



**CASCADING KINERJA
TAHUN 2022**



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) Fax. 204038

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Kondisi Organisasi.....	2
1.2.1. Susunan Kepegawaian.....	2
1.2.2. Perlengkapan.....	3
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Visi dan Misi.....	10
2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	12
2.4. Strategi dan Kebijakan Umum.....	14
2.5. Cascading Kinerja.....	16

BAB III PENUTUP.....

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.

Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan

desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.

Dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai dengan saat ini, masih ditemukan di banyak kondisi instansi pemerintah, diantaranya (1) sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi; serta (2) desain program/kegiatan tidak memiliki dampak/daya ungkit bagi pencapaian tujuan organisasi. Kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dalam hal manajemen SDM, kinerja aparatur yang tidak jelas dan tidak terukur membuat mekanisme *reward and punishment* menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi tidak terarah.

Oleh karenanya, dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tepat. Pedoman ini akan mengarahkan instansi pemerintah untuk membangun model berpikir logis yang benar dalam rangka mendapatkan kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik

kepada kinerja individu, serta desain strategi/program/kegiatan yang tepat sasaran.

1.2. GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

1.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Perda Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 133 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Status dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	52	28	80
2	CPNS	0	0	0
3	NON PNS	41	12	53
Jumlah				133

b. Golongan Ruang

No	Status Pegawai	Golongan Ruang																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	0	0	1	5	3	7	10	13	4	8	7	14	6	1	1	0	80
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	NON Golongan /Ruang																53
Jumlah																		133

c. Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	7	1	30	0	5	26	11	0	80
2	CPNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	9	6	3	0	2	6	0	0	53
Jumlah										133

d. Jabatan/ Esselon

No	Status Pegawai	Jabatan / Esselon					Jumlah
		II	III	IV	Jampung	Pelaksana	
1	PNS	1	1	11	19	44	80
2	CPNS	0	0	0	0	0	0
3	NON PNS	0	0	0	0	53	53
Jumlah							133

1.2.2. Perlengkapan

Perlengkapan Yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta rincian secara lengkap terlampir pada Lampiran 2 dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan

- Bangunan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Purwakarta berdiri pada sebidang tanah dengan luas tanah 1485 m² dan luas bangunan 953 m²
- UPTD Pengembangan Sentra Industri kramik dan Gerabah dengan luas tanah 6380 m² dan luas bangunan 3525 m²
- Kawasan Industri Di Desa Kopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 9.545m²
- Bangunan Pasar Tradisional di Pasar Rebo, Pasar Jumat, Pasar Simpang, Pasar Leuwi Panjang, Pasar Plered dan Pasar Wanayasa dengan luas tanah 34.596 M² dan luas Bangunan 11.664 M².
- Relokasi Pasar Tradisional Plered Citeko Plered dengan luas tanah 28.056 m² dan luas bangunan 16.269m².
- Rumah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta di Purwakarta dengan luas tanah 283 m² dan luas bangunan 180 m².

b. Kendaraan :

- Kendaraan Roda Empat, sebanyak 6 buah
- Kendaraan roda dua, sebanyak 30 buah .

c. Perlengkapan lainnya :

- Seperangkat peralatan work-shop (alat bengkel)
- Seperangkat alat pemeliharaan.
- Seperangkat alat kantor.
- Seperangkat perlengkapan kantor (mesin tik, computer, laptop, dll)
- Seperangkat alat penyimpanan/arsip (lemari, filing cabinet, rak, brandkas, dll)
- Seperangkat alat kantor lainnya (deteksi uang palsu, white board, papan pengumuman, dll)
- Seperangkat alat pendingin ruangan kerja (AC, Kipas, dll)
- Seperangkat peralatan dapur.
- Seperangkat alat dapur.
- Seperangkat personal komputer.
- Seperangkat meja/kursi kerja dan alat-alat penunjangnya.
- Seperangkat lemari arsip dinamis.
- Seperangkat alat komunikasi.
- seperangkat alat jaringan (internet).
- Seperangkat alat-alat penunjang lainnya.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan 241 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana tersebut di atas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

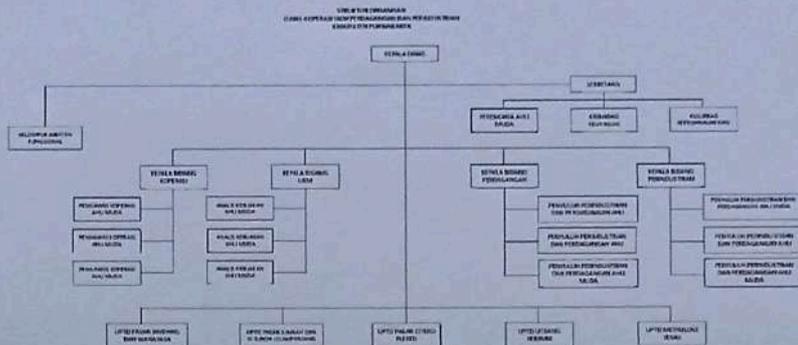
Sedangkan susunan organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertaris, terdiri atas :
 1. Sub bagian keuangan
 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Pengawas Koperasi Ahli Muda
 2. Pengawas Koperasi Ahli Muda

3. Pengawas Koperasi Ahli Muda
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri atas ;
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
 - f. Bidang Perindustrian, terdiri atas ;
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda;
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;
 1. UPTD. Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang
 2. UPTD. Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa
 3. UPTD. Pasar Citeko Plered;
 4. UPTD Metrologi Legal dan
 5. UPTD Pengembangan Keramik dan Gerabah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan Struktur Organisasi



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Penyusunan Cascading Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 adalah:

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Fungsional dilingkup Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian yang tercantum didalam RPJMD serta RENSTRA Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Cascading Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan dan Pohon Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Visi dan Misi
- 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
- 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.5 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN POHON KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah

dirumuskan pada akhir tahun 2018, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

2.2 VISI dan MISI.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Visi dan Misi disamakan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

Visi Mengandung Makna bahwa : “mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-

problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka.

Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan **Visi Mewujudkan Purwakarta Istimewa** tersebut, maka ditetapkan **4 Misi** yang diemban **Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Hanya 1 Misi ke 4** adalah :

**“Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang
Kokoh Berbasis Desa”**

2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas ditetapkanlah Tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Tabel 1

Tujuan Dinas Koperasi UKM Perdagangan
Dan Perindustrian

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan
Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar
Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **tujuan** Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian diperlukan beberapa **Sasaran** yg menggambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan** yang akan dicapai.

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan 1 (T.1)**, “Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan 1 (T.1)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran

2. **Tujuan 2 (T.2),**” Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tabel 3
Tujuan 2 (T.2)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif
Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh

3. **Tujuan 3 (T.3),**” Peningkatan perlindungan terhadap konsumen **Sasaran Strategis (SS)** :

Tabel 4
Tujuan 3 (T.3)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku

4. **Tujuan 4 (T.4),**” Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat **Sasaran Strategis (SS)** :

Tabel 5

Tujuan 4 (T.4)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan

5. **Tujuan 5 (T.5),**” Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar

Sasaran Strategis (SS):

Tabel 6

Tujuan 5 (T.5)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan

6. **Tujuan 6 (T.6),**” Meningkatkan peranan industri kecil, menengah

dalam meningkatkan produktifitas **Sasaran Strategis (SS) :**

Tabel 7

Tujuan 6 (T.6)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, yaitu :

Strategi

1. Pengembangan aparatur dan penguatan SDM untuk meningkatkan pelayanan publik
2. Meningkatkan Sistem dan Manajerial Koperasi Serta Kapasitas dan Kualitas SDM Pengelola Koperasi
3. Meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan
4. Peningkatan pengawasan persaingan usaha yang sehat dan tertib ukur
5. Peningkatan aktivitas pendistribusian sarana dan prasarana Perdagangan
6. Pelaksanaan pengelolaan retribusi yang optimal sesuai prinsip prinsip akuntabilitas
7. Meningkatkan produktifitas industri

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Kebijakan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. **Kebijakan** Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik
2. Membina, Mengawasi dan Memberikan Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi
3. Penguatan peran UMKM dalam peningkatan kapasitas sumber daya

manusia kelembagaan dan usaha

4. Peningkatan tertib ukur dan Peningkatan pengawasan kemetrolagian dan tera, tera ulang UTTP
5. Pengembangan jaringan distribusi yang efisiensi informasi harga, stok dan barang beredar
6. Mengoptimalkan perolehan pendapatan retribusi melalui intensifikasi/ekstensifikasi sumber sumber pendapatan
7. Mendorong pertumbuhan industri, mikro, kecil, menengah dan besar

2.4 POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan.

- Model Logis (*logic model*): Merupakan alat/metode yang digunakan untuk membantu proses berpikir logis dalam menjabarkan bagaimana berbagai kondisi komponen saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan kondisi hasil yang diinginkan (Poister, 2003)
- Merupakan representasi grafis sederhana dari suatu sistem yang menunjukkan relasi logis suatu proses

Model logis terdiri dari tahapan kondisi yang saling berkaitan/berhubungan dalam membentuk outcome/hasil yang diharapkan. Tahapan kondisi ini membentuk sebuah alur logis yang tersistem yang sering dinamai dengan rantai nilai (value chain), yang model sederhananya terdiri dari input, proses, output, outcome. Input merupakan besaran sumber daya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk memproduksi output (keluaran) baik barang maupun jasa. Proses merupakan aktivitas atau upaya yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output. Output merupakan barang/jasa yang dihasilkan oleh sebuah organisasi dalam rangka mencapai outcome. Sedangkan outcome adalah hasil dari berfungsinya output.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Output dan Outcome

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Dinas	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dkumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dkumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Arsip	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat Menyurat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi	
	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	
	Jumlah Tenaga Operator	
	Jumlah Tenaga Penjaga Malam	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		

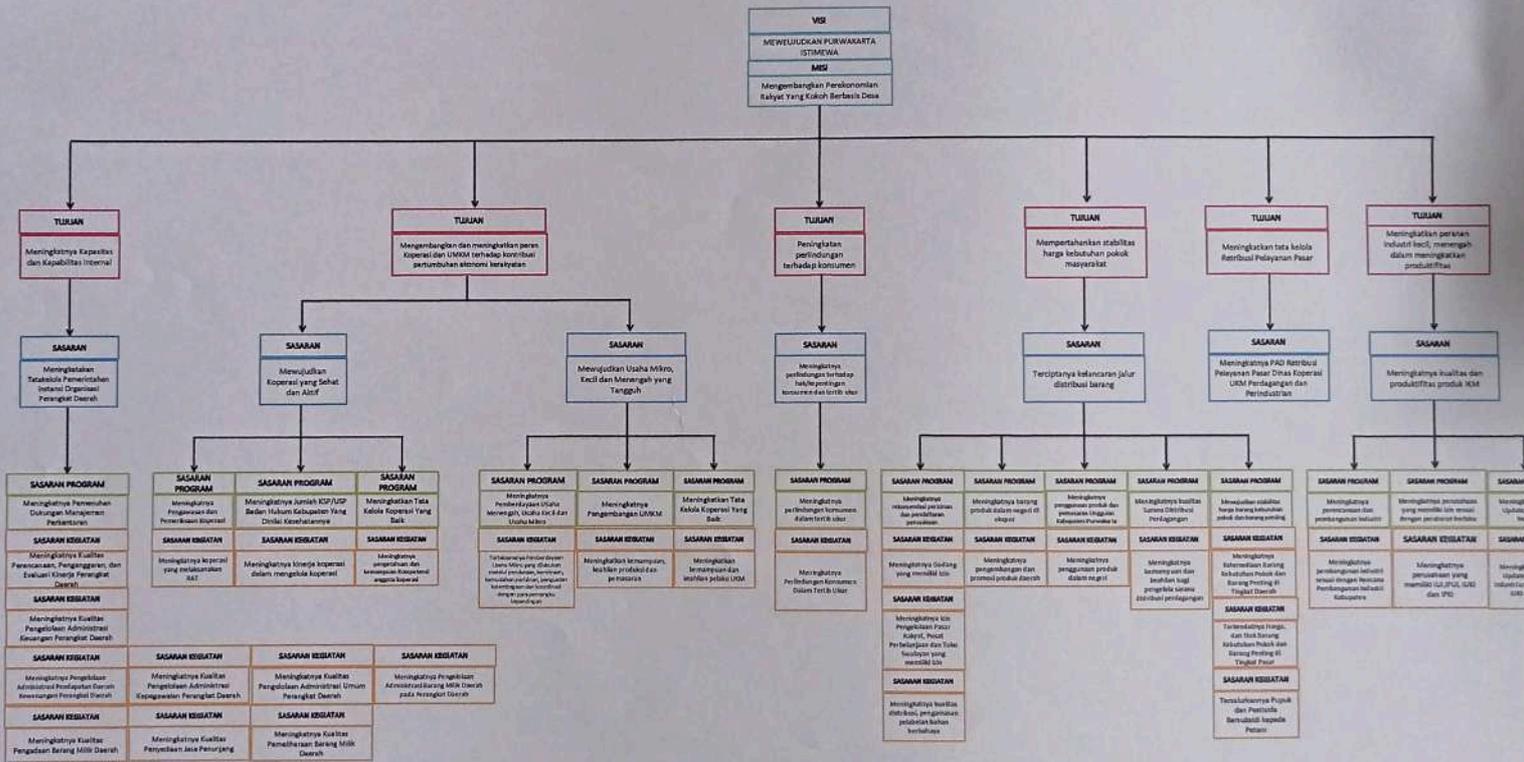
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan terhadap koperasi sehat	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang dilatih	
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah Pelatihan Pemasaran Digital	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelatihan UKM	
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibina	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Usaha Mikro Dalam Mendapatkan Perizinan	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelatihan Teknik Substantif UKM	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Workshop Wirausaha Kopi Purwakarta	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya P-B2 dan PA-B2 bagi Pelaku Usaha	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Diberdayakan	Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah dokumen pengendalian stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Kegiatan Akselerasi Unit Metrologi Legal	
	Jumlah Pemeliharaan Standar UML	
	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana UML	
	Jumlah Penunjang Operasional Tera/Tera Ulang	
	Jumlah Standar UML	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Jumlah Penunjang Operasional Penyuluh Metrologi Legal	
	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Kegiatan Penunjang Potensi Kerajinan dan Unggulan Daerah	

	Jumlah Pelatihan Potensi Kerajinan dan Unggulan Daerah	
	Jumlah Sumber Daya IKM Yang Mengikuti Pelatihan	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kemasan Produk Menong	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil Pedesaan	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Realisasi Produksi terhadap IKM	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Diseminasi SIINAS	

POHON KINERJA

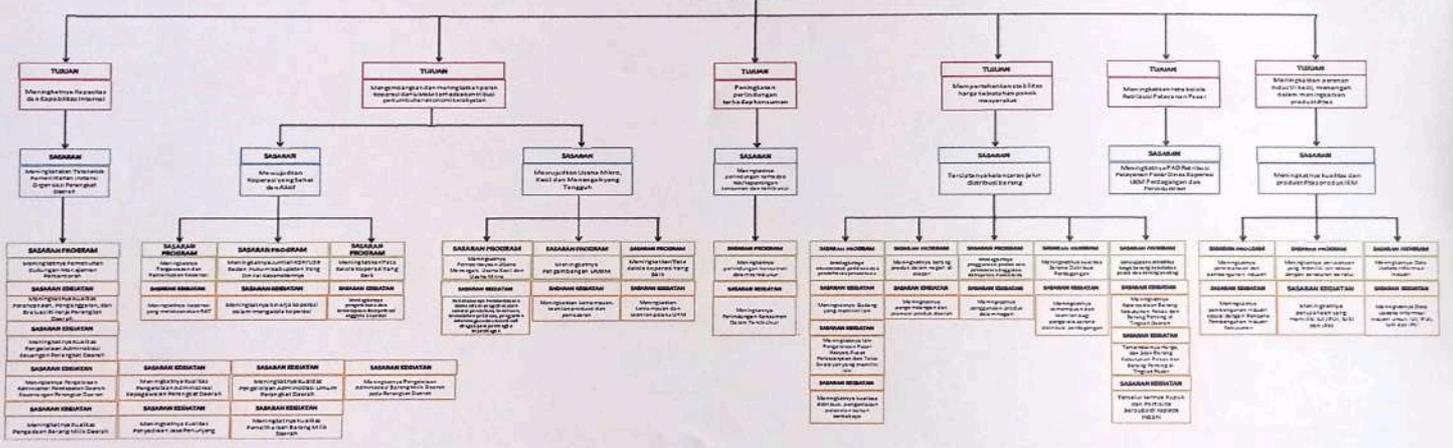


BAB III
PENJENJANGAN KINERJA

3.1. PENJENJANGAN KINERJA

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan organisasi kepada Esselon III sampai dengan individu pegawai, pada table di bawah

VI
MEMBUKUKAN PERUSAHAAN
DI MALINDI
VI
 Mengembangkan Perencanaan
 Rantai Pasokan Berbasis Data



**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

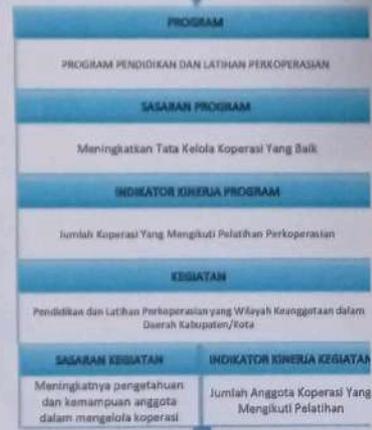
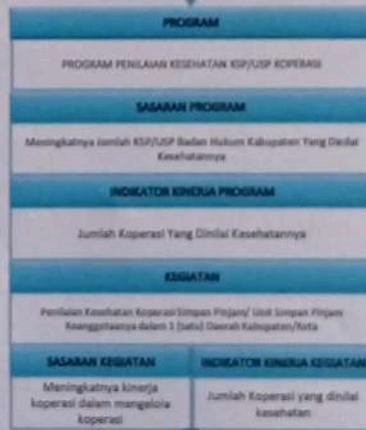
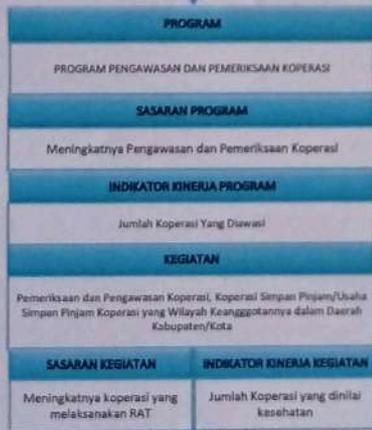
Drs. HJ. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2001

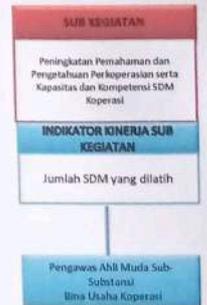
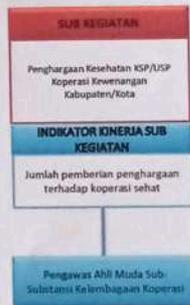
KEPALA BIDANG KOPERASI

VISI
MEWUJUDKAN
PURWAKARTA ISTAMAWA
MISI
Mengembangkan Pelaksanaan
Rakyat Yang Aktif Berbasis Desa

TUJUAN
Mengembangkan dan meningkatkan
peran Koperasi dan UKM terhadap
sumbu pertumbuhan ekonomi
daerah

SASARAN
Mewujudkan Koperasi yang
Sehat dan Aktif

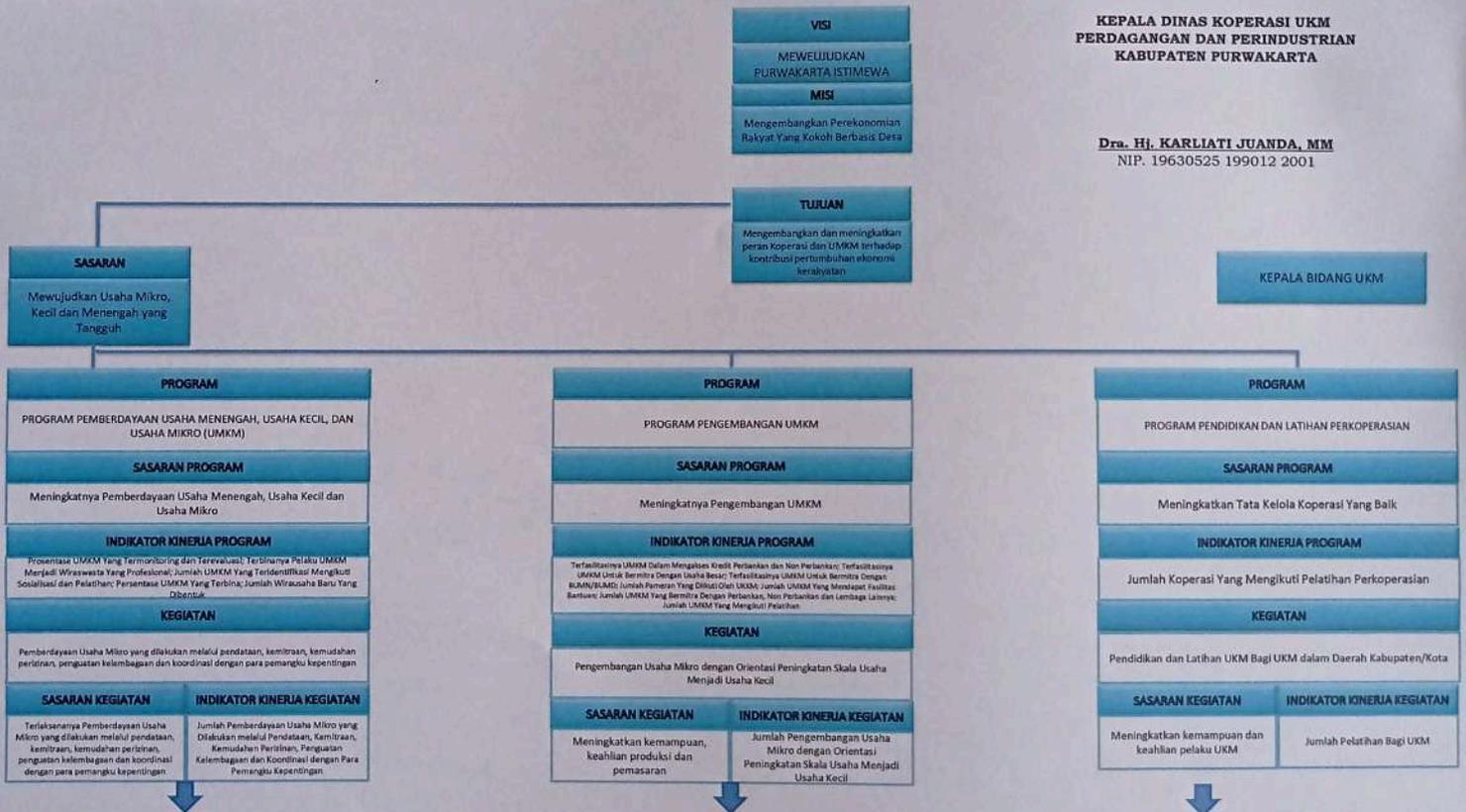




CASCADING KINERJA BIDANG UKM TAHUN 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2001





VISI
 MENJULUKKAN
 PURWAKARTA ESTIMAWA
MISI
 Mengembangkan Perekonomian
 Rakyat yang lebih Berbasis Pasar
TUJUAN
 Mempertahankan stabilitas
 harga kebutuhan pokok
 masyarakat
SASARAN
 Terciptanya kelancaran jalur
 distribusi barang

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM
 PROGRAM PERIZINAN DAN
 PENDAFTARAN PERUSAHAAN
SASARAN PROGRAM
 Meningkatnya rekomendasi
 perizinan dan pendaftaran
 perusahaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 Terfasilitasnya rekomendasi
 perizinan dan pendaftaran
 perusahaan

PROGRAM
 PROGRAM PENGEMBANGAN
 EKSPOR
SASARAN PROGRAM
 Meningkatnya barang produk
 dalam negeri di ekspor
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 Peningkatan nilai export di
 Kabupaten Purwakarta
KEGIATAN
 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui
 Forum Dagang dan Meeting bagi
 Produk Dagang Unggulan yang meliputi
 padi 3 (tiga) Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN
 Meningkatnya pengembangan
 dan promosi produk daerah
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 Jumlah pembinaan dan
 pengembangan produk

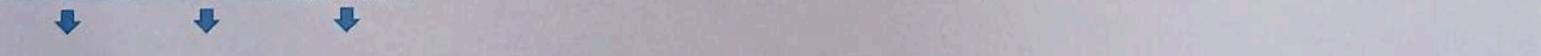
PROGRAM
 PROGRAM PENGUNAAN DAN
 PEMASARAN PRODUK DALAM
 NEGERI
SASARAN PROGRAM
 Meningkatnya penggunaan
 produk dan pemasaran Unggulan
 Kabupaten Purwakarta
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 Terciptanya penggunaan produk
 dan pemasaran Unggulan
 Kabupaten Purwakarta
KEGIATAN
 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
 Negeri
SASARAN KEGIATAN
 Meningkatnya penggunaan
 produk dalam negeri
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 Jumlah even dan sosialisasi
 promosi, pemasaran
 penggunaan produk dalam
 negeri

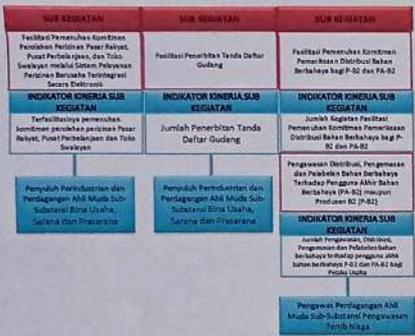
PROGRAM
 PROGRAM PENINGKATAN
 SARANA DISTRIBUSI
 PERDAGANGAN
SASARAN PROGRAM
 Meningkatnya kualitas Sarana
 Distribusi Perdagangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 Tersedianya sarana dan
 prasarana distribusi
 perdagangan di Kabupaten
 Purwakarta
KEGIATAN
 Peningkatan Terhadap Pengelola Sarana
 Distribusi Perdagangan Monev di
 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN
 Meningkatnya kemampuan dan
 keahlian bagi pengelola sarana
 distribusi perdagangan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 Jumlah pembinaan pengelola
 sarana distribusi

PROGRAM
 PROGRAM STABILISASI HARGA
 BARANG KEBUTUHAN POKOK
 DAN BARANG PENTING
SASARAN PROGRAM
 Menajutkan stabilitas harga
 barang kebutuhan pokok dan
 barang penting
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
 Terkendalinya harga kebutuhan
 pokok dan barang penting di tingkat
 pasar rakyat, pasar modern dan
 distributor

KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebaran Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain Usaha Toko Swalayan	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Gudang yang memiliki izin	SASARAN KEGIATAN Meningkatnya kualitas distribusi, pengemasan pelepasan bahan berbahaya
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan lain-lain Usaha Toko Swalayan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebaran Bahan Berbahaya

KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Distribusi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	SASARAN KEGIATAN Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	SASARAN KEGIATAN Terselenggaranya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi kepada Petani
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Jumlah pengawasan penyuluhan dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

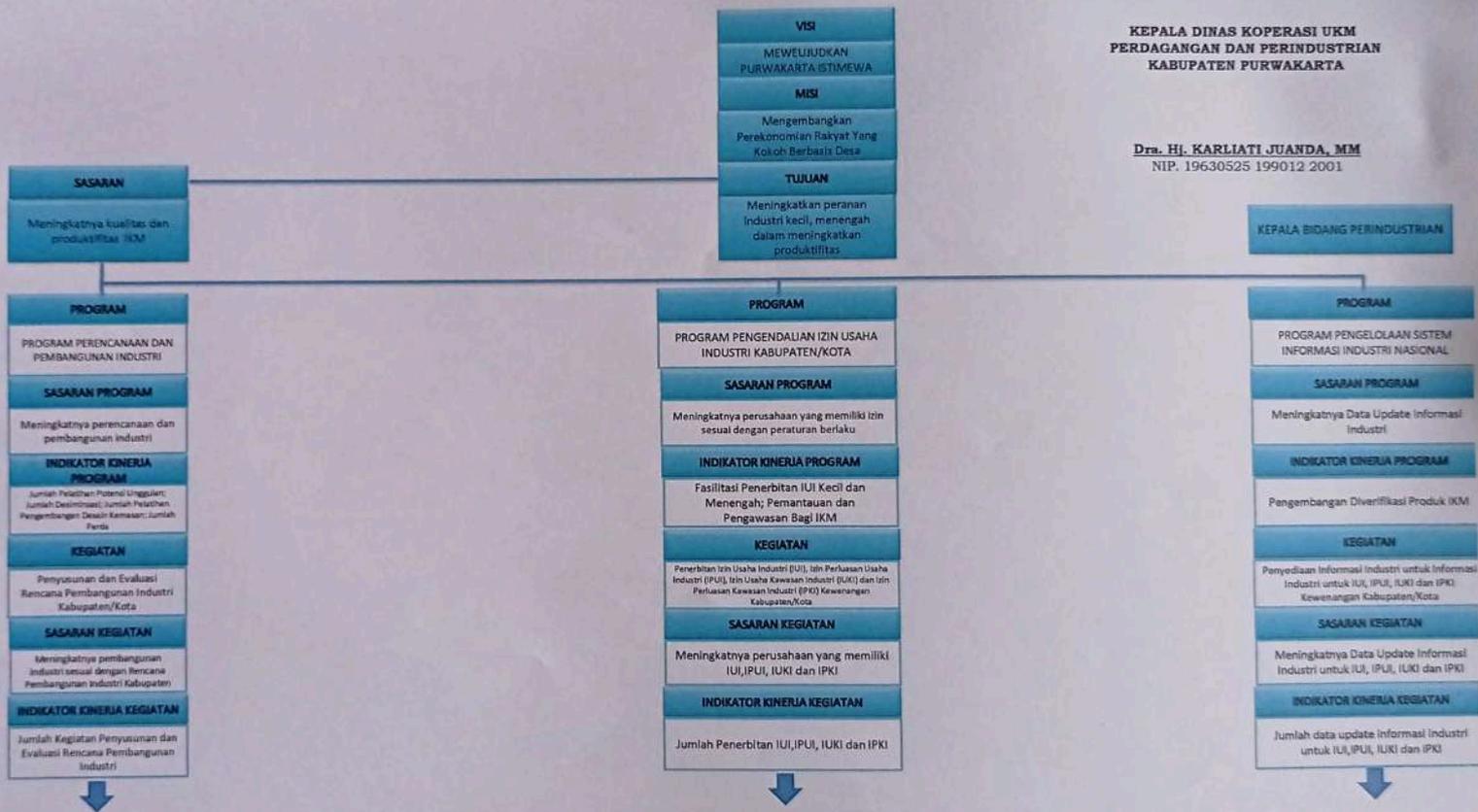




CASCADING KINERJA BIDANG PERINDUSTRIAN

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2001



SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kemasan Produk Menong
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
Jumlah Kemasan Produk Menong	Jumlah Kemasan Produk Menong

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub-Substansi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

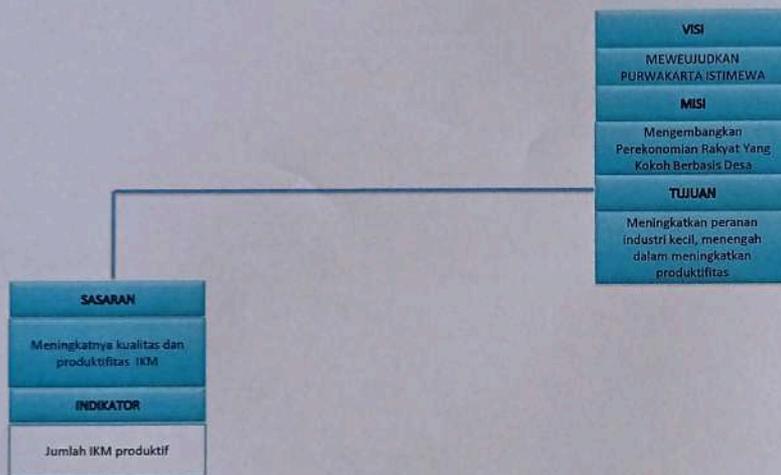
SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup (UI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Kabupaten
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub-Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronik Anasa

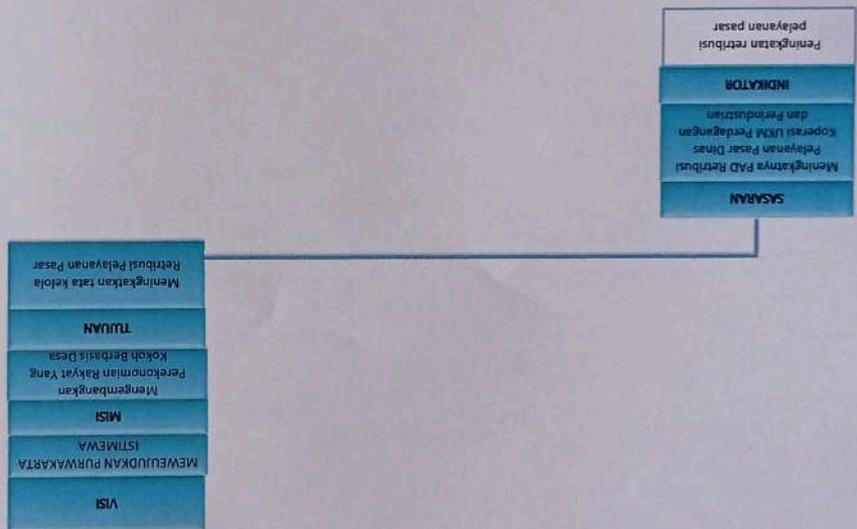
SUB KEGIATAN
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Diseminasi SINAS
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub-Substansi Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Industri

LOGFRAME KINERJA UPTD SENTRA KERAMIK

KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIA
KABUPATEN PURWAKARTA

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2001

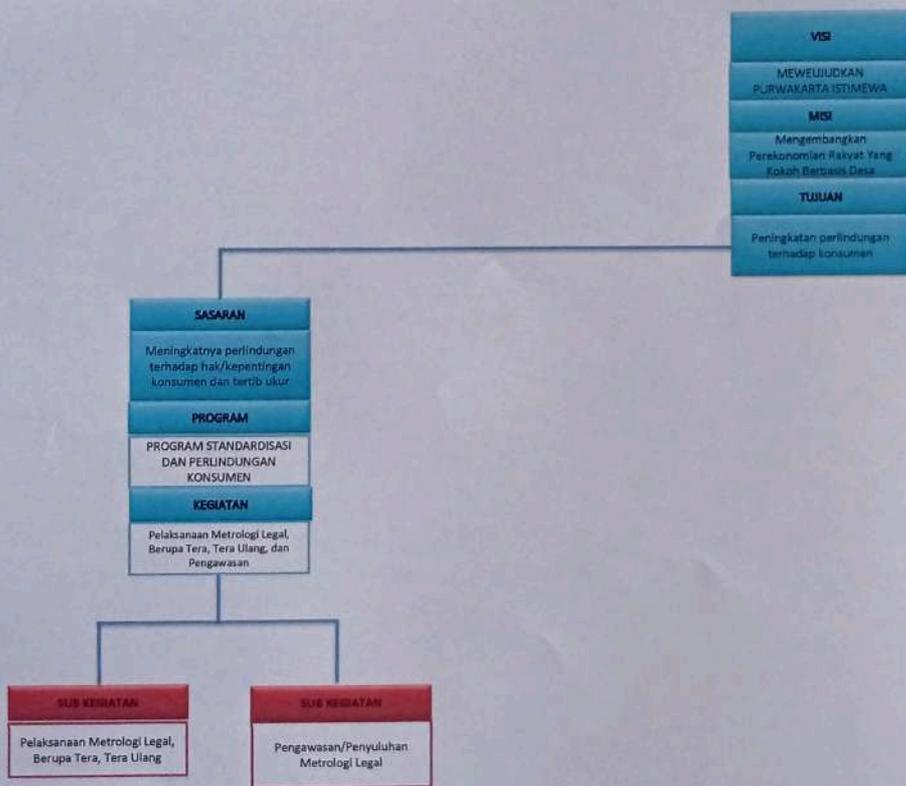




KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dra. H. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2001

CASCADING KINERJA UPTD METROLOGI LEGAL



KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

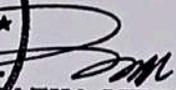
Nama : ANNE RATNA MUSTIKA
Jabatan : Bupati Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,

ANNE RATNA MUSTIKA

Pihak Pertama,

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

PERJANJIAN KINERJA**SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indikator Kinerja Utama Pemda				
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100	
		Laju Koperasi Aktif	95	
2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	70	
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4.92	
Indikator Kinerja Utama OPD				
3	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	80	
4	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	150	
5	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	150	
6	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda terasah yang berlaku	1700	
7	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	9	
8	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	100	
9	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	30	

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.335.553.220
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.550
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	449.991.750

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	49.997.900
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	54.978.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.999.650
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	329.994.250
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100.000.000
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	299.999.100
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	50.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	440.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	29.998.800
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	29.999.300

Purwakarta , Januari 2022

PIHAK KEDUA



[Signature]
ANNERATNA MUSTIKA

PIHAK PERTAMA



[Signature]
Dra. HJ. KARLIATI JUANDA, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

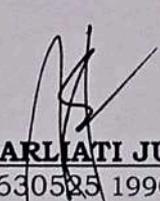
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

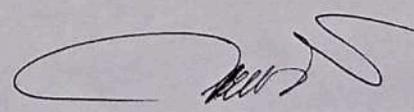
Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

NIP. 19630525 199012 2 001


Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM

NIP. 19661105 199403 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

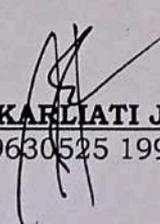
NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diawasi	150	
2	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Meningkatnya Jumlah KSP/USP Badan Hukum Kabupaten Yang Dinilai Sehatannya	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	150	
3	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Meningkatnya Tata Kelola Koperasi Yang Baik	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	150	

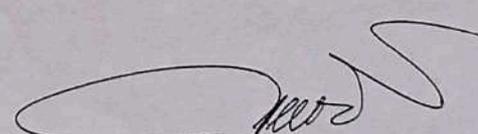
KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	49.999.550	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	294.202.000	DAK Non Fisik

Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu


Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
 NIP. 19630525 199012 2 001


Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
 NIP. 19661105 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

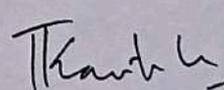
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2 001


TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP
NIP. 19721119 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERIDUSTRIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan; Jumlah Desiminsasi; Jumlah Pelatihan Pengembangan Desain Kemasan; Jumlah Perda	100; 100; 25; 1 Orang; Orang; Buah; Buah	
2	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Meningkatnya perusahaan yang memiliki izin sesuai dengan peraturan berlaku	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah; Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	10; 30 Unit Usaha	
3	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Meningkatnya Data Update Informasi Industri	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	5 Buah	

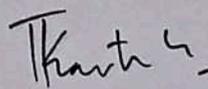
KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	440.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	29.998.800	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	29.999.300	

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu


Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
 NIP. 19630525 199012 2 001


TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP
 NIP. 19721119 199803 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD NIZAR, S.Pd, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang UKM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

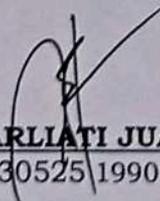
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

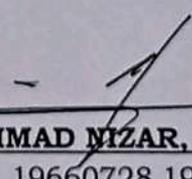
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525199012 2 001


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si
NIP. 19660728 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG USAHA KECIL MENENGAH
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi; Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional; Jumlah UMKM Yang Teridentifikasi Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan; Persentase UMKM Yang Terbina; Jumlah Wirausaha Baru Yang Dibentuk	60; 40; 150; 60; 40 UMKM	
2	Program pengembangan umkm	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan; Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar; Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD; Jumlah Pameran Yang Dikuti Oleh UMKM; Jumlah UMKM Yang Mendapat Fasilitas Bantuan; Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perbankan, Non Perbankan dan Lembaga Lainnya; Jumlah UMKM Yang Mengikuti Pelatihan	50; 10; 20; 2; 15; 20; 100 UMKM	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Meningkatnya Tata Kelola Koperasi Yang Baik	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	150 Unit	

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	404.991.750	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	49.997.900	
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	DAK Non Fisk

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
 NIP. 19630525 199012 2 001

AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si
 NIP. 19660728 199802 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HADIONO KUAT WIDODO

Jabatan : Pengawas Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi
Pengawasan dan Pemeriksaan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
NIP. 19661105 199403 1 007

Drs. HADIONO KUAT WIDODO
NIP. 19640910 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
SUB-SUBTANSI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

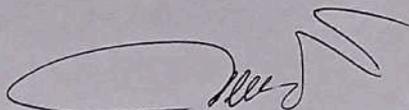
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya koperasi yang aktif sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	150 Koperasi	

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.550	

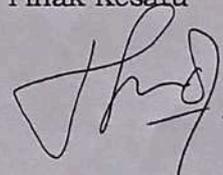
Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
 NIP. 19661105 199403 1 007



Drs. HADIONO KUAT WIDODO
 NIP. 19640910 200701 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. NENENG SUPRIHATIN, S.Sos

Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi
Bina Usaha Koperasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM

Jabatan : Kepala Bidang Koperasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
NIP. 19661105 199403 1 007

Hj. NENENG SUPRIHATIN, S.Sos
NIP. 19640828 198903 2 010

PERJANJIAN KINERJA

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
SUB-SUBTANSI BINA USAHA KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

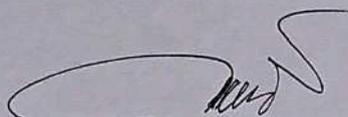
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota dalam mengelola koperasi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	150 Koperasi	

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	294.200.000	DAK Non Fisik

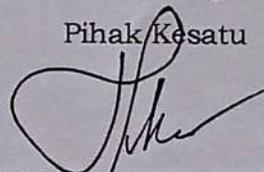
Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
NIP. 19661105 199403 1 007



Hj. NENENG SUPRIHATIN, S.Sos
NIP. 19640828 198903 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDIN SUPARMAN, SKM. MM.Kes
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda Sub Koordinator Sub Substansi
Kelembagaan Koperasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
NIP. 19661105 199403 1 007

DIDIN SUPARMAN, SKM. MM. Kes
NIP. 19700404 199102 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
SUB-SUBTANSI KELEMBAGAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

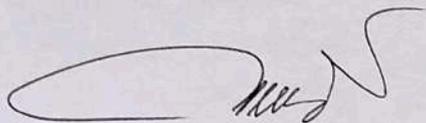
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah	Meningkatnya Kinerja Koperasi Dalam Pengelola Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatanya	150 Koperasi	Kegiatan

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	

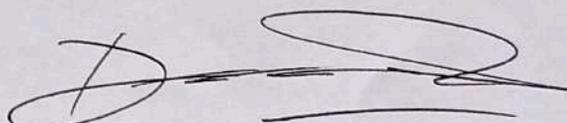
Purwakarta , April 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
 NIP. 19661105 199403 1 007



DIDIN SUPARMAN, SKM. MM. Kes
 NIP. 19700404 199102 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi
Kemitraan dan Promosi UKM
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD NIZAR, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang UKM
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

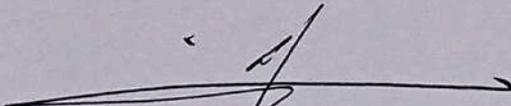
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

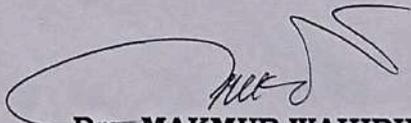
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si
NIP. 19660728 199802 1 001


Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
NIP. 19661105 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

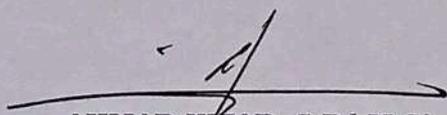
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5 Kegiatan	
	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kemampuan dan Keahlian Pelaku UKM	Jumlah Pelatihan Bagi UKM	1 Kegiatan	

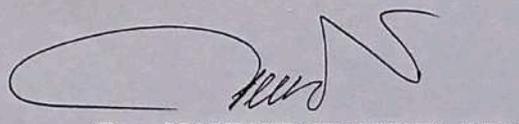
SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.999.750	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	49.997.300	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.998.750	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	110.000.000	

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si
 NIP. 19660728 199802 1 001


Drs. MAKMUR WAHIDIN, MM
 NIP. 19661105 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SULASTRI, MM

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi
Pemberdayaan UKM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD NIZAR, S.Pd, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang UKM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

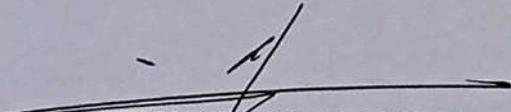
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

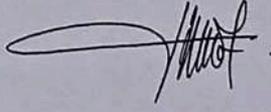
Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si

NIP. 19660728 199802 1 001


Dra. SULASTRI, MM

NIP. 19650304 199403 2 005

PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5 Kegiatan	

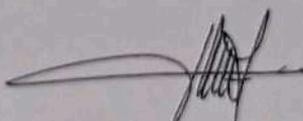
SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	249.998.900	

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si
 NIP. 19660728 199802 1 001


Dra. SULASTRI
 NIP. 19650304 199403 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYATI, S.ST

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi
Pengembangan UKM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD NIZAR, S.Pd, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang UKM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

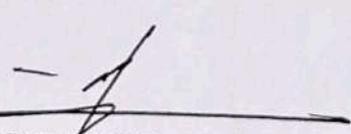
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

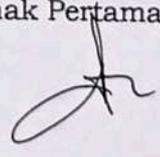
Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si

NIP. 19660728 199802 1 001


SURYATI, SST

NIP. 19661105 199403 1 007

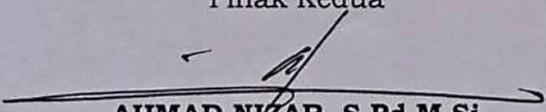
PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5 Kegiatan	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatkan Kemampuan, Keahlian Produksi dan Pemasaran	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 Kegiatan	

SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	49.997.050	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	49.997.900	

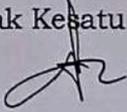
Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua


AHMAD NIZAR, S.Pd.M.Si

NIP. 19660728 199802 1 001

Pihak Kesatu


SURYATI, SST

NIP. 19661105 199403 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENI ISMAWATI, SE, MM

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Sub-Substansi Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Industri selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

NIP. 19721119 199803 2 004

HENI ISMAWATI, SE, MM

NIP. 19810327 200801 2 007

PERJANJIAN KINERJA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI PENGEMBANGAN, PROMOSI DAN KERJASAMA INDUSTRI
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

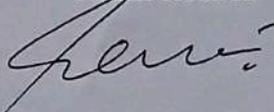
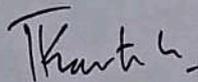
NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Data Update Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah data update informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50 Berkas	

KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	29.999.300	

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE,M.AP

NIP. 19721119 199803 2 004

HENI ISMAWATI, SE,MM

NIP. 19810327 200801 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMANDA, SE

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator
Sub-Substansi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

NIP. 19721119 199803 2 004

HERMANDA, SE

NIP. 19791222 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

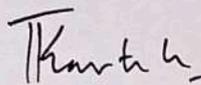
NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembangunan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	4 Kegiatan	

KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	150.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	90.000.000	

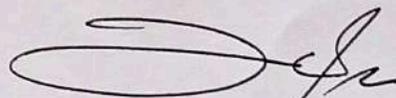
Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE,M.AP
NIP. 19721119 199803 2 004



HERMANDA, SE
NIP. 19791222 200604 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. MIKI YALA

Jabatan : Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator
Sub-Substansi Industri Logam, Mesin, Elektronik Aneka
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

NIP. 19721119 199803 2 004

R. MIKI YALA

NIP. 19640403 198703 1 005

PERJANJIAN KINERJA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
SUB-SUBSTANSI INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIK ANEKA
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

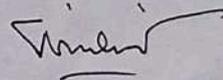
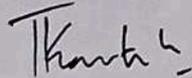
NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya perusahaan yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50 Berkas	

KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	29.998.800	

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



TIKTIK KARTIKA WULANSARI, SE, M.AP

R. MIKI YALA

NIP. 19721119 199803 2 004

NIP. 19640403 198703 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI HENDRIYANI, STP,MP
Jabatan : Kepala UPTD Metrologi Legal
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
Jabatan : Kepala Dinas pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Kesatu



Dra. HJ. KARLIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2 001

DESI HENDRIYANI, STP,MP
NIP. 19811226 200902 2 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Meningkatnya Perlindungan Konsumen Dalam Tertib Ukur	Standarisasi Produk Dalam Perlindungan Konsumen	80	

KEGIATAN	ANGGARAN	KET
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	299.999.100	

Purwakarta , Januari 2022

Pihak Kesatu



Dra. H. KARLIATI JUANDA, MM
 NIP. 19630525 199012 2 001

DESI HENDRIYANI, STP, MP
 NIP. 19811226 200902 2 003